



KALBAGTIMES



EDISI 12 / SEPTEMBER 2022

@bckanwilkalbagtim



SAMBUTAN . . .

ADIL KA' TALINO,
BACURAMIN KA' SARUGA, BASENGAT KA'
JUBATA

SEGALA PUJI BAGI ALLAH YANG TELAH
MEMBERIKAN KAMI KEMUDAHAN SEHINGGA KAMI
DAPAT MENYELESAIKAN BULETIN KALBAGTIMES
YANG TERBIT SETIAP TANGGAL 15.

KALBAGTIMES TERBIT ATAS TIMBULNYA RASA
PERLU UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI
TERKINI SEPUTAR KANTOR UNTUK MENAMBAH
PENGETAHUAN PEGAWAI DI KANWIL DJBC
KALIMANTAN BAGIAN TIMUR.

SEMOGA DENGAN ADANYA KALBAGTIMES MAMPU
MENINGKATKAN MOTIVASI KINERJA PEGAWAI
DALAM MENCIPTAKAN INOVASI DAN IDE-IDE
LAINNYA DEMI KEMAJUAN INSTANSI.

AKHIR KATA, SELAMAT MEMBACA CESS!!!

TIM

PELINDUNG

KUKUH SUMARDONO BASUKI

PENANGGUNG JAWAB

IRWAN

PEMIMPIN REDAKSI

WIDYO TUTUKO

REDAKTUR

ANGGRAENI DINDA
ERSA ADISTY

EDITOR

ANGGRAENI DINDA

FOTOGRAFER

ERSA ADISTY

DAFTAR ISI

- 01** HOT ISSUE
- PEMBERLAKUAN SSM QUARANTINE
 - KENALI JENIS-JENIS CYBERCRIME
 - TIPS MENGHINDARI HACKER
- 04** PELECEHAN SEKSUAL DI KANTOR
- 07** STOP ROKOK ILEGAL
- 08** SEPUTAR KANTOR WILAYAH
- 12** SEPUTAR KANTOR PELAYANAN
- 15** PENERIMAAN S.D. AGUSTUS 2022
- 17** 1ST ANNIVERSARY KALBAGTIMES



SINERGI PENANGANAN DAMPAK INFLASI MELALUI BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL

Kemenkeu – Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Dirjen PK) Astera Primanto Bhakti mengatakan penanganan dampak inflasi akibat dari kenaikan harga BBM bersubsidi yang diumumkan pada tanggal 3 September 2022 lalu, mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dengan adanya penganggaran untuk belanja perlindungan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi agar APBN dapat melindungi masyarakat kurang mampu dan agar penggunaan subsidi menjadi lebih tepat sasaran.

“Pemerintah juga memberikan bantalan yang dilakukan oleh daerah, melalui earmarking Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil), Pemda ini diberikan kewenangan untuk membuat program sehingga dampak dari inflasi tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat, dan tentunya ini juga menggunakan data-data yang telah teruji sebelumnya” jelas Astera.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 yang diterbitkan oleh pemerintah, maka Pemda berkontribusi memberikan dukungannya berupa penganggaran belanja wajib perlindungan sosial untuk periode Oktober sampai dengan Desember 2022 sebesar 2% (dua persen) dari Dana Transfer Umum (DTU) diluar Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditentukan penggunaannya.

Namun, belanja wajib perlindungan sosial tidak termasuk belanja wajib 25% dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022. Adapun belanja wajib tersebut dipergunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada ojek, UMKM, dan nelayan, memberikan subsidi pada sektor transportasi, serta menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, daerah juga wajib menyampaikan laporan yang sekaligus menjadi persyaratan penyaluran DAU dan DBH PPh Pasal 25/29 (bagi daerah yang tidak mendapatkan alokasi DAU) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, yang terdiri dari: (i) laporan penganggaran belanja wajib, paling lambat pada tanggal 15 September 2022, (ii) laporan realisasi belanja wajib, setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya, dan (iii) laporan disampaikan dalam bentuk PDF melalui e-mail resmi DJPK.

Dengan begitu, efektivitas pelaksanaan bantuan sosial sangat diperlukan. Maka, pengelolaan dan pemantauan atas pelaksanaan belanja wajib dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan diawasi pelaporannya oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang terdampak inflasi.



MULAI 1 SEPTEMBER 2022, SSM QUARANTINE CUSTOMS BERLAKU DI 14 PELABUHAN

Layanan Single Submission Quarantine Customs (SSm QC/SSm Pabean Karantina) akan berlaku secara mandatory di 14 pelabuhan di Indonesia mulai per 1 September 2022. Hal tersebut disepakati dalam penandatanganan Pakta Integritas Penerapan SSm Quarantine Customs pada 14 Pelabuhan di Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Jakarta (22/08).

Adapun pelabuhan yang akan memberlakukan SSm Quarantine Customs secara mandatory ini adalah Pelabuhan Tanjung Priok, Belawan, Surabaya, Makassar, Semarang, Lampung, Pekanbaru, Palembang, Pontianak, Balikpapan, Batam, Cilegon, Samarinda, dan Kendari.

Dalam acara tersebut dihadiri oleh Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan M. Agus Rofiudin, Koordinator Harian Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK), Kepala Badan Karantina Pertanian, dan Direktur Utama PT Pelindo, serta perwakilan dari seluruh instansi terkait di 14 pelabuhan, baik dari unit kantor vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, maupun PT Pelabuhan Indonesia.

Penandatanganan ini merupakan sebagai tanda komitmen pemerintah untuk melaksanakan percepatan perluasan layanan SSm Quarantine Customs dalam rangka pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan sesuai Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022.

Pengembangan layanan SSm Quarantine Customs merupakan bagian dari program penataan ekosistem logistik nasional (national logistics ecosystem/NLE) sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. NLE adalah wujud nyata upaya pemerintah dalam menghilangkan hambatan, meningkatkan kecepatan arus barang serta mendorong pengurangan biaya logistik dalam perdagangan internasional maupun domestik. Hal ini untuk menciptakan ekosistem logistik yang efisien, standar, sederhana, murah, dan transparan.

Melalui penerapan SSm Quarantine Customs yang dapat diakses melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), diintegrasikan dua pelayanan yang proses bisnisnya saling beririsan, yakni layanan pabean dan karantina. Alhasil pelaku usaha tidak perlu menginput data berkali-kali, melainkan cukup sekali melalui SINSW dan selanjutnya INSW yang akan mendistribusikannya ke instansi terkait.

Hasil dari pemantauan LNSW menunjukkan bahwa SSm Quarantine Custom Terbukti mampu mengefisienkan waktu dan biaya layanan importasi komoditas karantina. Estimasi Penurunan Biaya Timbun dan Biaya Penarikan untuk behandle/pemeriksaan pada periode Januari 2021 s.d. Juli 2022 sebesar 135,23M atau 33,48% serta rata-rata efisiensi waktu sebesar 20,59%. Oleh karena itu, perluasan implementasi SSm Pabean Karantina diharapkan akan dapat berkontribusi positif bagi penataan ekosistem logistik nasional dan meningkatkan kemudahan berusaha di Tanah Air.



KENALI JENIS JENIS CYBER CRIME

Cybercrime adalah tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Modus cyber crime macam-macam. Mulai dari pencurian data, pembobolan rekening, hingga minta-minta sumbangan atas nama korban. Cyber crime Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016.

Berikut contoh cyber crime yang menjadi ancaman di era internet ini:

Catfishing

Istilah catfishing sering terjadi di sebuah aplikasi kencan dengan menggunakan foto orang lain, tetapi data yang dibuat palsu. Tujuannya untuk menipu korban. Entah berupa uang, barang, maupun hal berharga lainnya.

Memalsukan Akun Media Sosial Seseorang

Tindakan cyber crime satu ini mungkin terdengar paling sering terjadi di dunia maya khususnya aplikasi Facebook. Di mana akun seseorang akan dikloning untuk melakukan tindakan kejahatan seperti meminta transfer uang dengan alasan pinjam. Umumnya teman dalam Facebook, meskipun dunia maya kebanyakan saling kenal dan sangat dekat, sehingga mudah percaya.

Virus Ransomware WannaCry

Contoh cyber crime yang dulu sempat menghebohkan jagad maya ialah virus ransomware. Cara kerjanya yaitu dengan mengunci seluruh data, kemudian meminta tebusan apabila menginginkan kunci untuk membukanya. Biasanya target yang dituju merupakan perusahaan atau instansi besar.

Doxing dan Cyberbullying

Doxing dilakukan untuk mengambil data seseorang, lalu disebar. Sama-sama merupakan bentuk kejahatan. Tujuannya sendiri berbeda-beda, bisa sebagai ancaman, mempermalukan atau pemerasan.

Menurut pendapat kalian, kejahatan yang dilakukan Bjorka termasuk jenis kejahatan apa?

TIPS MENGHINDARI HACKER

1. Jangan membuka **link sembarangan**, baik dari email, aplikasi chatting, atau iklan di website. Ada banyak link berbahaya yang sudah diedit supaya tidak mencurigakan.
2. Berhentilah **memakai wifi gratis di keramaian**. Misal wifi mall, restoran, dan spot khusus area terbuka.
3. Jangan **Membagikan Data Pribadi** Kamu Sembarangan
4. **Gunakan VPN**. VPN (Virtual Private Network) adalah sebuah layanan koneksi yang memungkinkan kamu untuk mengunjungi sebuah website dengan aman dan private
5. **Matikan Jaringan WiFi atau Bluetooth** Ketika Tidak Digunakan. Karena hal itu dapat mencegah perangkat kamu terkoneksi secara otomatis ke jaringan yang tidak aman tanpa kamu sadari.
6. **Aktifkan Enkripsi Disk Penuh Pada Komputer**. Full Disk Encryption (FDE) adalah sebuah metode untuk mengenkripsi hard drive sedemikian rupa sehingga semua data pada drive selalu dienkripsi, tanpa menggunakan solusi enkripsi pihak ketiga. Dengan mengaktifkan fitur tersebut, informasi data pribadi kamu di komputer akan tetap aman walaupun komputer kamu hilang atau dicuri.
7. **Gunakan Password Yang Kompleks** seperti campuran angka, huruf kapital, maupun simbol agar resiko terkena serangan hacker semakin rendah.
8. Jangan gunakan **Password yang Sama untuk Semua Akun**.
9. **Periksa Permissions Aplikasi Sebelum di-Install**. Selalu cek apa saja izin akses yang diberikan dan pastikan aplikasi yang ingin kamu install tersebut tidak mengakses informasi yang tidak diperlukan.



PELECEHAN SEKSUAL DI KANTOR

“Kalian tidak pernah sendirian, kumpulkan keberanian untuk melawan. Dan, sekali lagi, katakan pada diri sendiri, saya berani. Sekecil apapun kekerasan dan pelecehan seksual tidak dapat kita biarkan. Ini tentang kita semua, tentang orang-orang yang kita cintai.”

-Sri Mulyani-

Potensi terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kerja perlu mendapatkan perhatian kita semua. Tanpa pandang bulu, pelecehan seksual bisa menimpa siapapun. Komitmen pimpinan Kementerian Keuangan dalam menciptakan keadilan dan kesetaraan gender diwujudkan melalui penetapan kebijakan responsif gender yang dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-36/MK.1/2020 tentang Pencegahan dan Dukungan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja dalam rangka Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender Lingkup Kementerian Keuangan.

Dalam surat edaran tersebut Pelecehan Seksual diartikan sebagai salah satu bentuk dari Kekerasan Seksual yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja dan dilakukan melalui tindakan fisik maupun nonfisik oleh seseorang dan/atau kelompok kepada seseorang dan/atau kelompok lainnya, yang menasar bagian tubuh yang terkait dengan seksualitas/hasrat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak aman dan tidak nyaman, tersinggung, takut, terintimidasi, merasa direndahkan martabatnya dan menyebabkan masalah keselamatan serta kesehatan, baik secara fisik maupun mental.

Adapun beberapa bentuk pelecehan seksual yang dilarang, antara lain:

- menggunakan siulan;
- main mata;
- ucapan, candaan, atau komentar bernuansa seksual, termasuk yang terkait penampilan seseorang;
- menunjukkan materi pornografi dan/atau keinginan seksual;
- colekan dan/atau sentuhan pada bagian tubuh;
- gerakan tubuh atau isyarat yang bernuansa seksual; dan/atau
- bentuk perbuatan pemaksaan seksual lainnya, baik fisik maupun non fisik, termasuk pelecehan yang dilakukan melalui media sosial, dan/atau media komunikasi dalam bentuk apa pun;

Dampak yang dapat terjadi pada korban pelecehan seksual:

- Korban menghindari lingkungan kerja di mana Pelecehan Seksual terjadi
- Korban merasa malu, tidak berdaya dan tidak percaya diri
- Korban memiliki masalah gangguan psikologis dan mental
- Korban tidak fokus bekerja dan mengalami penurunan kinerja.

PENANGANAN KORBAN

Upaya efektif dalam mencegah pelecehan seksual, Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan edukasi melalui berbagai program orientasi dan pelatihan/seminar kepada pegawai serta komunikasi dengan sosialisasi melalui berbagai media cetak dan elektronik, media sosial, layanan konsultasi psikologi, dan lain-lain.

Lalu bagaimana penanganan terhadap korban?

01.

Korban dapat lapor pada <https://www.wise.kemenkeu.go.id>, dan saluran pengaduan yang dikelola oleh unit kerja.

02.

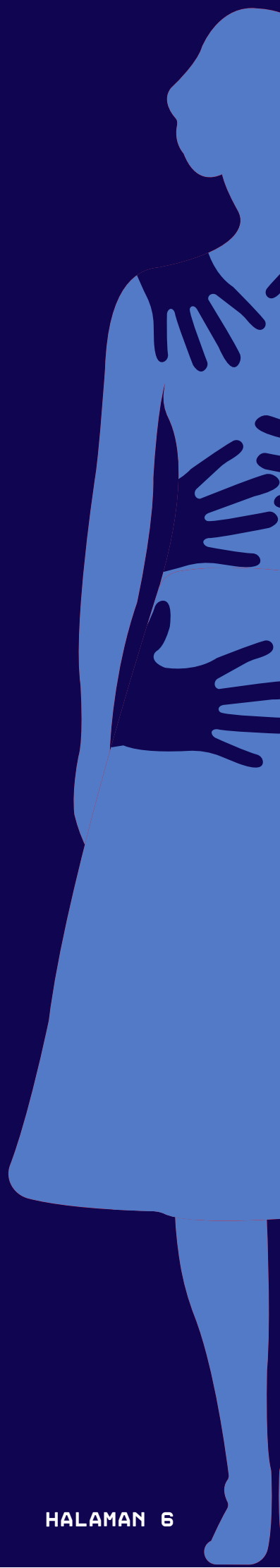
Melaporkan kepada atasan langsung atau unit kepatuhan internal kantor

03.

Kemudian, atas laporan yang didapat pasti akan ditindak lanjuti dengan saksama, termasuk memantau secara berkala terhadap kondisi fisik dan mental korban

Dalam proses penanganan korban juga diberikan hak atas informasi seluruh proses penanganan, perlindungan dan pemulihan, dukungan dan/atau bantuan hukum, layanan kesehatan, dan perawatan medis, serta layanan lain sesuai kebutuhan khusus korban. Serta perlindungan seperti kerahasiaan identitas pelapor, pemberitaan yang berlebihan, ancaman dari pihak lain, berulangnya kejadian pelecehan terhadap korban,

Apabila terbukti melanggar kode etik, pelaku akan dikenakan hukuman disiplin sebagaimana diatur pada PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selain penindakan kepada pelaku, korban juga akan diusahakan untuk mendapatkan pemulihan berupa layanan kesehatan baik fisik maupun mental, mulai dari proses sampai berakhirnya penanganan, penyediaan bimbingan rohani, dan penguatan dukungan lingkungan kerja.



STOP
ROKOK
ILEGAL





LAGI! BEA CUKAI BERI FASILITAS KAWASAN BERIKAT



Balikpapan (06/09/2022) - PT. Phoenix Resources Internasional, perusahaan yang bergerak pada industri pulp dan berlokasi di Tarakan melakukan pemaparan proses bisnis perusahaan di ruang pertemuan Kanwil DJBC Kalbagtim. Pemaparan dilaksanakan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai kawasan berikat (KB).

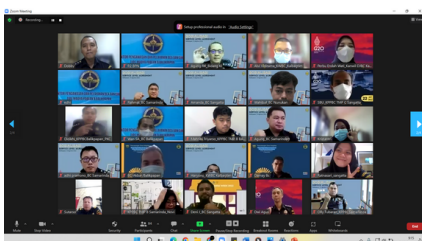
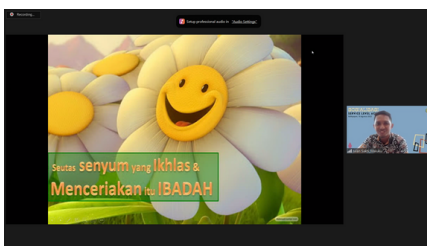
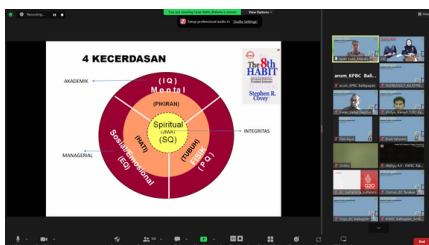
Kegiatan dilaksanakan secara hybrid, dengan pertemuan tatap muka dihadiri oleh Kepala Kanwil BC Kalbagtim-Kukuh Sumardono Basuki, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai-Irwan, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai-Dwi Agus Prasodjo, para Pejabat Pengawas di Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, Bidang Kepabeanan dan Cukai dan Bidang Penindakan dan Penyidikan serta para pimpinan beserta tim dari PT. Phoenix Resources International. Sedangkan secara online dihadiri oleh Kepala BC Tarakan, perwakilan dari Kanwil DJP Kaltimtara dan KPP Pratama Tarakan serta komisaris PT. Phoenix Resources Internasional.

Pihak perusahaan menjelaskan secara lengkap, mulai dari profil perusahaan, proses produksi, layout rencana kegiatan, web IT Inventory dan CCTV, rencana pengelolaan lingkungan, rencana investasi, program community development hingga dampak ekonomi. Diskusi berlangsung secara interaktif antara DJP-DJBC dengan pihak PT. Phoenix Resources Internasional. Setelah break out, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai-Irwan membacakan hasil kesimpulan yang menyatakan bahwa perusahaan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan fasilitas KB.

Dengan mendapatkan fasilitas kawasan berikat diharapkan perusahaan mampu meningkatkan kontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian sehingga meningkatkan penerimaan negara serta kesejahteraan masyarakat terutama di daerah sekitar.



TINGKATKAN PELAYANAN DENGAN "CECSC"



Balikpapan (16/08/2022) - Dalam rangka memberikan pedoman layanan yang terstandar kepada para pegawai guna meningkatkan kualitas pelayanan, Kanwil BC Kalbagtim mengadakan sosialisasi "Service Level Agreement" atau jika disingkat "SLA". SLA sekarang dikenal dengan nama "Customs & Excise Client Service Charter" atau "CECSC". Acara dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh seluruh pegawai Kanwil BC Kalbagtim serta KPPBC dibawahnya. Berperan selaku narasumber yang spesial adalah Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJBC Maluku- Iwan Saktiawan.

Beliau menyampaikan materi terkait Customs & Excise Client Service Charter. "Ketika mengangkat telepon langsung sapa penelepon dengan ucapan selamat pagi, selamat siang atau selamat sore dan sebutkan nama instansi, tidak perlu mengucapkan halo," terang Iwan.

Diharapkan setelah diadakan acara sosialisasi ini, para pegawai dapat menjaga serta meningkatkan kualitas pelayanan memastikan para stakeholder memperoleh pelayanan prima di lingkungan Kalbagtim.

Pingahayu INDONESIA KE-77





BEKANTAN

Jenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan & satu dari dua spesies dalam genus Nasalis. Bekantan merupakan hewan endemik pulau Kalimantan yang tersebar di hutan bakau, rawa dan hutan pantai.

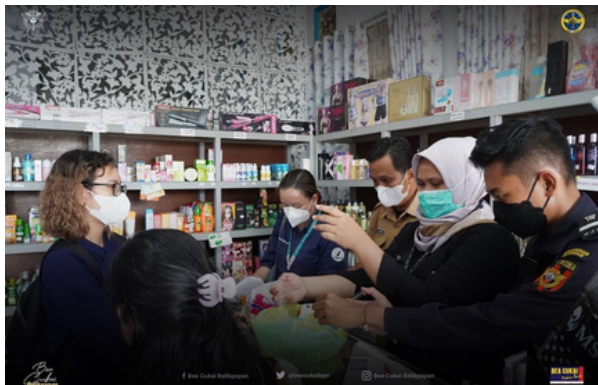


01 BC BALIKPAPAN BERANTAS KOSMETIK ILEGAL

Bea Cukai Balikpapan turut serta dalam aksi pemberantasan kosmetik ilegal yang diinisiasi oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan kota Balikpapan.

Kegiatan pemberantasan kosmetik ilegal ini dilakukan dengan mendatangi beberapa toko kosmetik yang ada di kota Balikpapan. Atas temuan kosmetik ilegal tersebut, dilakukan pemusnahan langsung oleh pemilik sarana dengan disaksikan oleh petugas. Pada kesempatan ini juga diberikan penyuluhan dan pembinaan kepada pemilik sarana agar tidak menjual kosmetik/obat ilegal kembali.

Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, dapat memberantas peredaran kosmetik ilegal di wilayah kota Balikpapan sehingga dapat melindungi masyarakat dari bahaya barang tersebut.



02 PENERAPAN SSM PENGANGKUT DAN SSM QUARANTINE CUSTOMS (QC)

Samarinda (23/08) - Peningkatan Kualitas Sistem Pelayanan di 14 Pelabuhan Utama di Indonesia Bea Cukai Samarinda bersama seluruh instansi terkait Menandatangani Pakta Integritas Penerapan SSm Pengangkut dan SSm Quarantine Customs (QC)

Bea Cukai Samarinda bersama instansi-instansi terkait telah menandatangani Pakta Integritas Penerapan SSm Pengangkut dan SSm Quarantine Customs (QC) di 14 pelabuhan utama, dalam rangka mendukung transparansi dan efisiensi layanan di pelabuhan. Acara ini merupakan tindak lanjut atas pelaksanaan Aksi Strategis Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022.





03 SURVEY HARGA TRANSAKSI PASAR BARANG KENA CUKAI (BKC)

Bontang (07/09) - Berlokasi di Wilayah Kota Bontang, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Bontang melakukan Survey Harga Transaksi Pasar (HTP) Hasil Tembakau (HT)

Selama survey, petugas menghampiri beberapa Tempat Penjualan Eceran (TPE) untuk mendata berbagai BKC HT yang dijual di toko tersebut, mulai dari Merk, Pabrik hingga Harga Jual Eceran (HJE) BKC tersebut. Bersamaan dengan survey tersebut, petugas juga memberikan edukasi kepada pihak yang bersangkutan terkait BKC legal dan ilegal.



04 APLIKASI SI-PINTAR (SISTEM PERIZINAN TIMBUN DAN BONGKAR)

Sangatta (08/09) - Bea Cukai Sangatta melaksanakan Sosialisasi Aplikasi SI-PINTAR (Sistem Perizinan Timbun dan Bongkar) sekaligus penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan kegiatan Bea Cukai Menyapa. Rangkaian kegiatan bersama perwakilan dari seluruh importir, pengangkut, dan PPJK di wilayah Kutai Timur dilaksanakan di Aula Korsa Kantor Bea Cukai Sangatta.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Bea Cukai Sangatta, Benny Wismo Noegroho. Selanjutnya, materi sosialisasi SI-PINTAR disampaikan oleh Pelaksana Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, Gifari Azka dan kemudian dilanjutkan kegiatan Bea Cukai Menyapa yang dipimpin oleh Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, Imron Mudofar.

Rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada stakeholder terutama perizinan timbun dan bongkar, menjalin intimasi dengan stakeholder, dan menjaga mutu pelayanan Bea Cukai Sangatta sehingga tingkat kepuasan stakeholder dapat terus ditingkatkan.





05 BC TARAKAN BERSAMA POLDA KALTARA GAGALKAN PEREDARAN 1.889 BUTIR EKSTASI

Tanjung Selor – Bea Cukai Tarakan bersama dengan Polda Kaltara berhasil mengamankan ribuan pil ekstaksi yang diungkap dalam Kegiatan Press Release Pengungkapan Peredaran Gelap Narkotika pada Senin (05/09/22). Bertempat di Selasar Gedung B Mako, Polda Kaltara.

Kegiatan Press Release ini mengungkap kasus peredaran gelap Narkotika jenis sabu seberat 1,1 Gram, Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.889 Butir dengan berat 767 Gram dan 2 pucuk senjata api rakitan jenis penabur. Dihadiri oleh Dir Resnarkoba Polda Kaltara Kombes Pol. Agus Yulianto, S.Sos., S.I.K., M.Si. dan di dampingi oleh Kepala Kantor Bea Cukai Tarakan, Minhajuddin Napsah serta Kabid Humas Polda Kaltara, Kombes Pol. Budi Rachmat, S.I.K., M.Si.,

Kronologi kejadian berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Pondok Tambak Pinggir sungai Pangkaran Kel. Tanjung Buka Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan Prov. Kaltara yang diduga menjadi tempat penyimpanan Narkotika. Tim gabungan yang terdiri dari anggota Bea Cukai Tarakan dan Polda Kaltara langsung menuju lokasi tambak yang dimaksud menggunakan Speedboat milik Bea Cukai Tarakan pada hari Minggu (21/08) dan berlanjut pada hari Senin, (22/08) tim gabungan berhasil menemukan lokasi yang dimaksud melakukan penggerebekan di tempat tersebut.

Dari hasil penindakan tersebut, Bea Cukai Tarakan bersama dengan Polda Kaltara berhasil mengamankan 2 orang tersangka dan mengamankan barang bukti penangkapan berupa 2 bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu dan 38 bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis ekstasi dan 2 pucuk senpi rakitan jenis penabur.

06 BOETZOKING KAPAL YACHT

Selama bulan September, Bea Cukai Nunukan melaksanakan pemeriksaan terhadap 13 Kapal wisata Yacht dari berbagai negara yang datang dari perairan Tawau, Malaysia yang akan melanjutkan perjalanan ke perairan Indonesia bagian timur melalui wilayah Nunukan. Kegiatan Pemeriksaan dilaksanakan di perairan area Pelabuhan Lim Hie Djung.

Kapal wisata Yacht yang masuk ke Indonesia diberitahukan sebagai Impor Sementara. Pemeriksaan fisik kapal wisata Yacht merupakan salah satu prosedur yang dilaksanakan Bea Cukai untuk menindaklanjuti permohonan para pelayar/agen pelayaran yang tertuang pada formulir Vessel Declaration sebagai persyaratan untuk melakukan impor sementara terhadap kapal wisata Yacht. Pemeriksaan fisik kapal wisata Yacht juga bertujuan agar saat dilakukan ekspor kembali (kapal meninggalkan wilayah Indonesia), kapal tersebut masih sesuai seperti saat kapal datang.

"<https://vds.beacukai.go.id/YachtOnline>"



MONPERA

Monumen Perjuangan Rakyat adalah tugu peringatan untuk mengenang suatu peristiwa bersejarah yang berada di Kota Balikpapan.

Berupa patung seorang prajurit dayak yang memegang bendera di depan kolam ikan mujair pada 1983.



PENERIMAAN

S.D. AGUSTUS 2022

BEA MASUK

Target : 1.136.172.425

Realisasi : 895.106.765

BEA KELUAR

Target : 2.968.111.812

Realisasi : 2.934.166.527.179

CUKAI

target : 624.744

Realisasi : 692.197

TOTAL
93,30%

Target : 4.104.908.981 Realisasi : 3.829.965.489



1st
Anniversary
KALBAGTIMES

QUIZ SPESIAL ANNIVERSARY

PADA EDISI KEBERAPA KALBAGTIMES PERNAH MEMUAT KONTEN
10 POKOK PENGATURAN PERDIRJEN BC 22/2021 ?

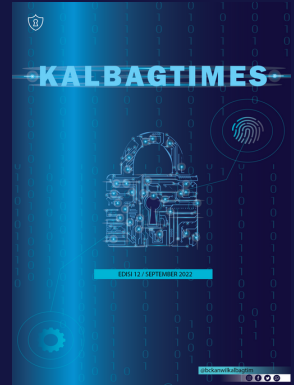
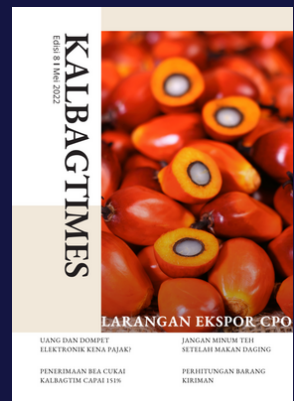


Pemenang Edisi Agustus 2022

1. Juan Prakoso

Selamat kepada para pemenang tercepat !!

KALBAGTIMES



Scan me!